

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Jepang ketidaksetaraan gender disebut dengan 男女不平等 (*danjou fubyoudou*). Munculnya tuntutan untuk kesetaraan gender sebagai akibat dari perubahan nilai sosial dalam masyarakat, kesadaran dari perempuan yang selama ini peran sosialnya dibatasi membuat perempuan bergerak untuk melakukan perubahan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam masyarakat, untuk mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan (Atmeiti, 2013). Maka ketidaksetaraan gender merupakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki tidak mendapatkan kesempatan dan hak yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan publik.

Jepang memanglah sebuah negara maju dengan tingkat rata-rata kehidupan yang baik seperti pada laporan *OECD Better Life Index* pada 2013 yang menyebutkan bahwa tingkat rata-rata kesejahteraan di Jepang seperti pendidikan, keamanan dan lingkungan mengungguli negara-negara lain. Namun rendah dalam hal keterlibatan sipil dan koneksi sosial. Hal ini sesuai dengan laporan yang

dikeluarkan oleh *The Global Gender Gap Index*, di tahun 2017 Jepang mendapatkan peringkat 114 dari 140 negara dalam kesenjangan gender. Pada tahun 2006 yaitu tahun pertama dimana *The Global Gender Gap Index* dirilis oleh *World Economic Forum*, Jepang mendapatkan peringkat 79 dari 153 negara dalam penilaian kesenjangan gender politik. Di tahun 2021, Jepang duduk di peringkat 147 dari 156 negara dalam kesenjangan gender di politik.

Shinzo Abe yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri melalui *Gender Equality Bureau Cabinet Office* atau Biro Kesetaraan Gender di bawah Kantor Kabinet merumuskan tujuan untuk mencapai *Womenomics* sebagai kebijakan atas transformasi masyarakat yang responsif gender. *Womenomics* merupakan kebijakan yang hadir dan diadopsi oleh Shinzo Abe pada periode ke-2 kepemimpinannya untuk mengubah nasib perempuan di dalam negeri, yaitu dengan melibatkan para perempuan dibidang ekonomi dan politik. Kebijakan ini diharapkan dapat mengubah struktur relasi gender yang patriarki dan telah menjadi sebuah budaya yang terlembagakan diberbagai sektor, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik (Gender Bureau Cabinet Office, 2017).

Pada konferensi *World Assembly for Women (WAW)* di Tokyo tahun 2016 Shinzo Abe mengumumkan ada tiga hal yang ia soroti demi mewujudkan *Womenomics* yaitu, menciptakan lingkungan di mana perempuan dapat sepenuhnya aktif, mengejar tujuan mereka untuk pekerjaan dan keluarga tanpa kesulitan yang tidak semestinya. Reformasi cara kerja, pasangan harus berbagi tanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak, cara kerja ini tidak akan berhasil tanpa perubahan pola pikir laki-laki.

Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk ada di posisi eksekutif (Gender Bureau Cabinet Office, 2017). Program kebijakan tersebut tertuang dalam *Act Concerning Promotion of Women's Career Activities (PWCA)* atau Undang-Undang tentang Promosi Kegiatan Karir Perempuan. Pada tahun 2015 undang-undang tentang promosi karir perempuan disahkan oleh parlemen Jepang (Baker McKenzie, 2015). Konsep dasar dari kebijakan *Womenomics* yaitu mendorong partisipasi perempuan dan memajukan peran perempuan Jepang ke dalam dunia kerja di bidang ekonomi dan politik yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan dukungan serta penerimaan masyarakat dengan *Womenomics*.

Shinzo Abe adalah perdana menteri yang dinilai perhatian dengan isu-isu perempuan dapat dilihat dari kebijakannya yang pro-gender. Namun, bahkan jika kebijakan *Womenomics* Abe terkenal feminis dan peduli dengan isu gender, tetapi dalam praktiknya masih banyak kesenjangan gender dalam lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Peringkat kesetaraan gender Jepang juga masih di posisi bawah. Jepang menempati posisi ke 165 dari 193 negara terkait jumlah perempuan yang berpartisipasi di pemerintahan. Ditambah lagi dengan penundaan ketercapaian dari kebijakan *Womenomics* hingga 2030, yang semula Jepang menargetkan di tahun 2020 sudah terisi 30% pos kepemimpinan oleh perempuan. Kebijakan penundaan ini dinilai oleh aktivis perempuan sebagai bentuk ketidakseriusan dan meragukan komitmen dari pemerintah Jepang dalam mengatasi ketimpangan gender dalam dunia ekonomi dan politik (Pramadiba, 2020).

Untuk pertama kalinya perempuan Jepang kemudian menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum ke-22, meskipun demikian, perjuangan hak pilih sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum itu. Pada tahun 1920, dibentuklah organisasi politik wanita pertama bernama *Shin Fujin Kyokai* oleh Hiratsuka Raichou, Ichikawa Fusae, Oku Mumeo dan lain-lain, untuk menyuarakan hak-hak politik perempuan (Koyama, 2012, 81). Kemudian perempuan diperbolehkan bergabung dengan organisasi politik meskipun masih belum memiliki hak pilih hingga tahun 1946.

Politik nasional di Jepang, seperti pada negara dengan bentuk masyarakat patriarki lainnya, merupakan cerminan dari dominasi laki-laki. Aturan-aturan yang berlaku menjadi batasan untuk mentransformasi kekuatan perempuan dalam keluarga, masyarakat, maupun sistem politik. Walaupun dalam konstitusi pasca-perang perempuan mendapatkan hak berpolitik yang setara dengan laki-laki, tetapi kenyataannya partisipasi perempuan dalam perpolitikan nasional tidak lebih dari sebagai pemilih. Jepang memberikan hak pilih pada perempuan mulai tahun 1946, sehingga mulai dari tahun tersebut menandakan bahwa peran perempuan sudah mulai dipikirkan dari tahun tersebut dan perempuan yang berpartisipasi dalam politik sudah mulai meningkat akan tetapi yang perlu ditekankan adalah representasi perempuan Jepang di bidang politik apakah sudah seimbang atau belum (Eto, 2010, hal. 177-178).

Menurut *National Democratic Union*, partisipasi perempuan dalam politik membantu memajukan kesetaraan gender dan turut mempengaruhi berbagai isu kebijakan yang dipertimbangkan dan solusi yang diambil.

Legislator laki-laki dan perempuan memiliki dampak yang berbeda pada prioritas kebijakan mereka sehingga penting bahwa untuk perempuan hadir dalam politik untuk mewakili keprihatinan perempuan dan pemilih terpinggirkan lainnya serta membantu meningkatkan daya tanggap pembuatan kebijakan dan tata kelola. Semakin banyak perempuan terpilih untuk menjabat di dunia politik, terdapat pula peningkatan yang baik dalam pembuatan kebijakan yang menekankan kualitas hidup dan mencerminkan kualitas keluarga, perempuan, etnis dan ras minoritas. Partisipasi politik perempuan memiliki dampak positif dan demokratis yang mendalam pada masyarakat, legislatif, partai politik dan kehidupan warga negara serta membantu mewujudkan demokrasi.

Dari uraian di atas dan melihat pentingnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik, karena salah satu cermin dari sebuah negara yang memiliki kesetaraan gender yang baik adalah dengan adanya keterwakilan perempuan yang seimbang dengan jumlah laki-laki. Dengan adanya perempuan dalam politik turut mempengaruhi keputusan yang akan diambil, sehingga keputusan tersebut nantinya ramah bagi perempuan di negara tersebut dalam hal ini adalah Jepang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencari jawaban dari bagaimana kondisi ketidaksetaraan gender dalam politik di Jepang dan apa sebenarnya yang menyebabkan ketidaksetaraan gender di Jepang dalam hal politik, padahal pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi kesetaraan gender. Untuk itu penulis merasa penting meneliti bagaimana ketidaksetaraan gender di Jepang terhadap peran perempuan dalam politik.

B. Rumusan dan Fokus Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana ketidaksetaraan gender dalam politik di Jepang?
- b. Apa saja penyebab ketidaksetaraan gender dalam politik di Jepang?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus dan terarah dalam pembahasannya, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini. Penulis membatasi penulisannya pada bagaimana kondisi permasalahan kesetaraan gender yang berkaitan dalam politik. Dan penyebab ketidaksetaraan gender dalam politik Jepang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui bagaimana permasalahan kesetaraan gender di Jepang dalam pemerintahan/politik.

- b. Mengetahui apa saja faktor yang menjadi penyebab dari ketidaksetaraan gender pada politik di Jepang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam permasalahan kesetaraan gender
- 2) Memberikan sumbangan ilmiah dalam permasalahan kesetaraan gender.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang isu kesetaraan gender.
- 2) Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kesetaraan gender.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti, yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting. . Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan dalam proses pengukuran variabel penelitian ini, variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional sebagai berikut.

1. Ketidaksetaraan Gender

(Fakih dalam Dewi dan Nugroho 2017, 2) ketidaksetaraan berasal dari kata dasar setara yang berarti sejajar, sama tingkatannya dengan sepadan. Jika kata setara di tambah dengan imbuhan ke- dan an- maka akan menjadi ketidaksetaraan yang berarti sesuatu yang tidak sejajar, tidak sama tingkatannya dan tidak sepadan. Sementara gender adalah suatu sifat atau yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.

2. Politik

Politik adalah saha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu (Budiardjo, 2008, 15).

3. Partisipasi politik

Partisipasi politik berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan tahapan penilaian keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik juga merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas (Miaz 2012, 20).

E. Sistematika Penulisan

Pada Bab I berisi Pendahuluan, menerangkan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Pada Bab II berisi Landasan Teoritis, menerangkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian mengenai konsep gender, konsep kesetaraan gender, diskriminasi gender di Jepang, konsep politik, sistem politik di Jepang, sejarah partisipasi perempuan dalam politik Jepang, Biro Kesetaraan Gender dan penelitian relevan. Pada Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan metode dan prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sumber data. Pada bab IV Analisis Data, yang menerangkan paparan data, analisis data dan interpretasi hasil penelitian. Pada Bab V berisi Kesimpulan yang berisi tentang inti beserta rangkuman dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan Saran untuk penelitian selanjutnya, pembaca dan kita semua.